

Analisis Kebijakan Pemulihan Sektor UMKM Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Pangkalpinang

Dessy Mayasari¹,

Administrasi Negara, Universitas, Terbuka, Tangerang Selatan

Correspondence: dessymayasari@ecampus.ut.ac.id

Received: 2 Juni, 2023 | Accepted: 30 November 2023 | Published: 1 Desember, 2023

Keywords: Digital Marketing; Market Place; Pandemic Covid-19; SMEs

Abstract

The Covid-19 pandemic, which has hit the world for two years, has had an impact on the sustainability of economic activity, especially for the MSME sector in Indonesia. As a result, many MSME actors experience very complex problems. The purpose of this research is to identify problems caused by the Covid-19 pandemic in the MSME sector and develop a recovery strategy. The method used in this study is the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) method by conducting in-depth calculations through Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) matrices. Based on the IFE value and EFE value, it shows that the impact caused by the Pandemic on the MSME sector with the policies implemented by the Pangkalpinang City government in an effort to recover the MSME sector, has not yet had an optimal impact due to the decline in production and distribution during the Covid-19 Pandemic, which has not improved. However, this policy is already in a positive direction because these conditions can slowly improve, because there are relevant relaxation programs such as funding assistance, MSME product festival programs and others. Based on the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analysis, it shows that the main strategy that must be developed more intensively by the Pangkalpinang City government is by encouraging product promotion using such as building a market place platform, strengthening branding and providing access to capital for MSMEs in Pangkalpinang City.

Kata Kunci:

kata kunci: Digital Marketing; Market Place; Pelaku UMKM; Pandemi Covid-19

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun, ternyata telah berdampak pada keberlangsungan kegiatan ekonomi khususnya terhadap sektor UMKM di Indonesia. Akibatnya banyak pelaku UMKM yang mengalami berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan terjadi akibat pandemi Covid-19 terhadap sektor UMKM dan menyusun strategi pemulihannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) dengan melakukan pendalaman melalui penghitungan Internal Factor Evaluation (IFE) dan matriks External Factor Evaluation (EFE). Berdasarkan nilai IFE dan nilai EFE menunjukkan bahwa, dampak yang disebabkan oleh Pandemi terhadap sektor UMKM dengan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya pemulihan sektor UMKM, masih belum optimal memberikan pengaruh yang karena penurunan produksi dan distribusi pada masa Pandemi Covid-19 belum membaik. Namun kebijakan tersebut sudah kearah positif karena kondisi tersebut perlahan dapat membaik, karena ada program relaksasi yang relevan seperti bantuan pendanaan, program festival produk UMKM dan lain-lain. Berdasarkan analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM), menunjukkan bahwa strategi utama yang harus dikembangkan secara lebih intensif oleh pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu dengan mendorong promosi produk menggunakan seperti membangun platform market place, penguatan branding dan adanya akses modal untuk pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor riil yang memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya untuk masyarakat menengah kebawah (Vidyatmoko Dyan, 2020). Kontribusi sektor UMKM di Indonesia menjadi pintu utama sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor UMKM tersebut telah mendorong adanya perluasan terhadap kesempatan kerja dan adanya penyerapan tenaga kerja informal di Indonesia. Eksistensi UMKM juga memberikan pengaruh terhadap akselerasi Produk Domestik Brutto (PDB) dan menjadi sektor penyelamat khususnya bagi penduduk yang memiliki pendapatan rendah guna mengembangkan aktivitas ekonomi produktif (Ahyar Syafwan Lysander et al., 2022). Sektor UMKM yang berada Indonesia sendiri memiliki nilai potensial untuk dikembangkan secara maksimal, karena pada semua daerahnya memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang kreatif, kekayaan alam melimpah, apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan berbagai produk UMKM. Menurut (Yunus Riza M, 2022) sektor UMKM memberikan kontribusi yang cukup baik sebesar Rp.1,105 triliun untuk PDB Indonesia. Besaran tersebut menempatkan Indonesia berada di posisi ketiga dunia, terkait dengan total kontribusi bidang UMKM terhadap PDB nasional. Pandemi Covid-19 secara masif memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi dunia yang telah melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Persoalan besar yang terjadi adalah memberikan dampak secara global terhadap berbagai sektor ekonomi dunia termasuk UMKM.

Secara spesifik, akibat pandemi Covid-19 terhadap sektor riil terutama bidang UMKM di Indonesia, mengakibatkan sebesar 87,52 persen pelaku UMKM berhenti menjalankan usahanya, dan 93,2 persen pelaku UMKM berhenti melakukan distribusi produk (Frihatni et al., 2021). Permasalahan yang terjadi pada sektor UMKM, berdampak pada penurunan keuntungan secara signifikan karena penurunan signifikan produksi yang cukup rendah. Secara umum masalah yang sedang dialami oleh pelaku UMKM meliputi persoalan keuangan maupun masalah faktor produksi serta distribusi. Bentuk kebijakan dari pemerintah pusat yang telah membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat melakukan mobilitas dan aktivitas, ternyata telah menghentikan kegiatan ekonomi, penurunan permintaan produk serta terganggunya rantai pasok (Abdi et al., 2022). Kegiatan ekonomi pada sektor pariwisata dan transportasi mendapat dampak paling besar akibat pandemi Covid-19 yang secara perlahan telah berpengaruh kepada sektor UMKM termasuk di Bangka Belitung. Menurut pernyataan dari Badan pusat Statistik (BPS), Provinsi Bangka Belitung tahun 2021 menyatakan bahwa kondisi pandemi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, khususnya di Kota Pangkalpinang. Banyak sektor ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan di tahun 2020, khusus untuk Provinsi Bangka Belitung telah terjadi kontraksi secara negatif sebesar 2,30 persen menurun sedang pada tahun 2019 tumbuh dan lebih yaitu 3,32 persen. Sementara menurut Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 menyatakan bahwa sektor UMKM Kota Pangkalpinang nilai pendapatannya mengalami penurunan dengan nilai 70,00 persen.

Keberlanjutan kegiatan dan usaha dari pelaku UMKM Kota Pangkalpinang pasca pandemi tersebut, sangat membutuhkan afirmasi kebijakan strategis dari pemerintah serta inovasi pengelolaan bisnis UMKM yang lebih progresif. Kebijakan pemerintah harus mampu memulihkan struktur rantai pasok seiring dengan terjadinya teknis perubahan proses distribusi, kapasitas nilai produksi, proses kegiatan produksi, dan metode proses produksi yang mampu

menyesuaikan dengan adaptasi baru setelah pasca pandemi (Raharja & Natari, 2021). Maka dari itu penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah internal dan eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang di masa pandemi. Selain itu menganalisis relevansi kebijakan pemberian afirmasi kebijakan ekonomi pemerintah Kota Pangkalpinang dan inovasi yang dilakukan terhadap masalah yang ada. Fokus masalah tersebut tentunya menjadi persoalan yang perlu diselesaikan, karena pola kebijakan yang simetris ternyata tidak menjawab persoalan dilapangan, mengingat masalah antar subsektor UMKM ssatu dengan yang lain berbeda. Harus ada alternatif kebijakan yang bisa memberikan alternatif dan skenario lainnya sehingga semua subsektor UMKM dapat keluar dari masalah yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis *Mix Method* yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sektor UMKM di Kota Pangkalpinang selama pandemi Covid-19. Selain itu menganalisis relevansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap dampak yang disebabkan oleh pandemi terhadap sektor UMKM. Langkah pertama dalam riset ini dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh terhadap sektor UMKM di Kota Pangkalpinang dengan memperhatikan pada situasi kelembagaan, perubahan lingkungan, dan persaingan produk menggunakan analisis SWOT yaitu *Strengths (S)*, *Weaknesses (W)*, *Opportunities (O)*, dan *Threats (T)* (Agustriyana Darwis Dkk, 2021). Berbagai data tersebut tentunya didapatkan dari proses pengamatan langsung dan *depth interview* menggunakan pendekatan *purposive sampling*, kepada pelaku usaha, pemerintah daerah pengelola UMKM dan stakeholder lainnya. Sementara untuk analisis kuantitatif dilakukan dengan memberikan skoring terhadap hasil identifikasi *Internal Factor Evaluation (IFE)* dan *External Factor Evaluation (EFE)* terkait dengan masalah sektor UMKM di Kota Pangkalpinang. Analisis tingkat lanjut dilakukan melalui proses *decision making* yang relevan dengan penggunaan strategi dan arah kebijakan yang tepat sesuai dengan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Analisis dengan QSPM tersebut berasal dari bobot rata-rata hasil identifikasi IFE dan EFE maka akan ada hasil Total Attractive Score (TAS). TAS yang memiliki skor terbesar dalam susunan strategi dari faktor internal dan eksternal akan menjadi faktor dan kunci sukses yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga menjadi strategi prioritas pertama dalam pengembangan UMKM, selanjutnya urutan prioritas kedua sampai terakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi dan Kendala Sektor UMKM di Kota Pangkalpinang Pasca Pandemi Covid-19

Berbagai kendala pada sektor UMKM yang terdapat di Kota Pangkalpinang karena pandemi Covid-19, memberikan pengaruh terhadap dimensi kehidupan sosial masyarakat karena sektor ini menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat, karena wilayah tersebut merupakan kota yang aktivitas utamanya adalah perdagangan. Disisi lain potensi yang tersedia sebelum masa pandemi juga mampu dikelola dengan baik. Perkembangan pelaku usaha baru juga terus berkembang yang terlihat dari beberapa sektor berkembang menjadi sektor unggulan. Salah satu produk UMKM yakni kuliner yang menggunakan baku dari ikan adalah

produk terbesar dan menjadi ciri khas di Kota Pangkalpinang, walaupun masih terdapat subsektor lainnya seperti kerajinan, fashion, dan produk lainnya. Produk kuliner tersebut menjadi produk unggulan utama yang mendominasi pertumbuhan dan perkembangan UMKM dengan sepuluh produk unggulan yg beredar di beberapa daerah di Kecamatan Gerunggang dan Kecamatan Gabek. Semenjak terjadinya pandemi, potensi produksi yang berlimpah belum maksimal didistribusikan, karena masih mengalami pembatasan mobilitas dalam usaha pengiriman barang atau proses transaksi. Pusat pengembangan utama mencapai 10 jenis produk unggulan yang beredar berasal dari wilayah Gerunggang, Pangkalbalam, Gabek serta beberapa daerah lainnya. Sementara itu pusat dan sentra kegiatan ekonomi UMKM di Kota Pangkalpinang berlangsung di Kecamatan Tamansari sebagai sentra kegiatan ekonomi di Kota Pangkalpinang. Selain berasal dari pelaku usaha di dalam Kota Pangkalpinang banyak produk juga berasal dari luar Kota Pangkalpinang diantaranya wilayah Koba.

Jumlah pelaku UMKM yang tersebar di Kota Pangkalpinang sebelum pandemi sebesar 28.198 pelaku usaha dan sebesar 70 persen diantaranya terkena dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Akibat pandemi tersebut banyak pelaku UMKM yang tidak mampu bertahan karena pusat aktivitas kegiatan ekonomi di beberapa titik telah dibatasi dan konsumen juga akhirnya terbatas. Selama berlangsungnya pandemi maka ketahanan pelaku usaha UMKM di Kota Pangkalpinang tidak sepenuhnya bisa bertahan menghadapi berbagai tantangan serta hambatan produksi serta distribusi. Akibatnya ada yang berhenti berproduksi karena keterbatasan modal, permintaan konsumen rendah dan belum mampunya pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan akses modal dan pasar untuk menjaga kestabilan produksi barang dari pelaku usaha UMKM. Pemerintah Kota Pangkalpinang belum mampu memberikan respon yang cepat terhadap masalah yang dialami oleh pelaku UMKM akibat pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan omset dan sulitnya mendapat bahan baku. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang baru bisa dilakukan saat ada beberapa kebijakan yang turun dari pemerintah pusat, diantaranya dengan menginisiasi *integrated system* pemberdayaan pelaku UMKM dengan pemerintah melalui penyediaan relaksasi modal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu pemerintah Kota Pangkalpinang mengedukasi dan memfasilitasi pelaku UMKM terkait *shifting* dari pemasaran melalui aktivitas pameran terbatas di wilayah kawasan wisata. Namun kebijakan tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan yang ada dilapangan. Berdasarkan hal tersebut usaha yang dilakukan pemerintah Kota Pangkalpinang masih belum optimal karena belum mendorong adanya sinergitas antar lembaga di tingkat perindustrian dan perdagangan khususnya yang ada di Provinsi Bangka Belitung ataupun di wilayah lainnya untuk kelancaran distribusi produk UMKM (Raharja & Natari, 2021).

Kelemahan menerapkan inovasi dalam bidang marketing dan distribusi produk menyebabkan selama dua tahun pelaku usaha UMKM sulit berkembang. Seharusnya keterbatasan mobilitas mendorong pemerintah untuk menyediakan platform digital terintegrasi yang bisa bermanfaat untuk pelaku usaha UMKM (Agustriyana Darwis Dkk, 2021). Akibat masalah produksi dan distribusi yang terhambat juga terpengaruh pada aktivitas yang terjadi di hulu yaitu pedesaan. Masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan karena rendahnya permintaan dan biaya distribusi dari desa sampai pusat kota atau pusat kegiatan menjadi tinggi (Emiliani et al., 2021). Pada masa pandemi sebelumnya bahwa minimnya kreativitas dan inovasi pengembangan produk yang diinisiasi antara pelaku UMKM dan

pemerintah daerah menjadi menyebabkan pelaku usaha UMKM tidak dapat mengoptimalkan distribusi produknya dengan baik. Selain itu dengan rendahnya permintaan barang dan jasa akibat banyak produk yang tidak tersalurkan ke konsumen secara langsung menyebabkan penurunan pendapatan pelaku usaha. Seharusnya banyak pilihan untuk menyediakan platform usaha dapat memudahkan dalam merancang konsep dan inovasi dalam pengembangan bisnis pelaku UMKM yang terintegrasi. Pemerintah daerah khususnya Kota Pangkalpinang sangat pasif dalam mendorong adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder khususnya melakukan *Research and Development*, *Branding* serta melakukan kerjasama dengan industri besar. Stabilitasnya usaha di masa pandemi atau sesudahnya bisa diminimalisir dengan adanya platform digital untuk marketing produk (Silfia & Utami, 2021).

Analisis Kebijakan untuk Pemulihan Sektor UMKM di Kota Pangkalpinang Pasca Pandemi Covid 19

Adanya berbagai dimensi permasalahan terkait dengan sektor UMKM antara lain karena masalah distribusi produk pelaku UMKM yang terhambat, menurunnya daya beli masyarakat, dan minimnya inovasi untuk menjawab tantangan masalah pandemi serta minimnya modal dalam pengelolaan usaha, sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat pada sektor UMKM khususnya pemerintah daerah. Inovasi dan transformasi dalam berbagai konteks dengan menyesuaikan terhadap perubahan perilaku konsumen dalam berbagai kondisi harus mampu menyesuaikan karakteristik pelaku usaha UMKM dalam hal besaran kapasitas dan tahapan produksi, serta bentuk inovasi produk sebagai bentuk transformasi bisnis UMKM pasca pandemi, yang lebih condong untuk menggunakan konsep ekonomi digital. Sangat dibutuhkan menyusun unsur-unsur berupa *Strengths (S)*, *Weaknesses (W)*, *Opportunities (O)*, dan *Threats (T)* dalam relaksasi bisnis UMKM di Kota Pangkalpinang. Menurut (Raharja & Natari, 2021) bahwa kekuatan dan kelemahan pengembangan usaha UMKM dibutuhkan masuk ke dalam faktor secara internal. Khusus untuk kelemahan dalam faktor internal digunakan untuk mengetahui seberapa besar memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis UMKM dan kekuatan akan memberikan nilai positif sebagai solusi. Secara lebih jelasnya dapat diidentifikasi pada tabel berikut.

Tabel 1. Perhitungan Matriks IFE Sektor UMKM di Kota Pangkalpinang

No	Faktor Internal	Besaran	Rating	Score
Kelemahan				
1	Hasil produksi UMKM masih belum sesuai dengan standarisasi marketing	0.131	2.341	0.3010
2	Kurangnya akses modal untuk mendukung usaha masyarakat	0.090	2.110	0.1850
3	Rendahnya strategi branding, inovasi dan penggunaan teknologi untuk produksis	0.080	2.751	0.2200
4	Masih minimnya kemampuan pelaku usaha melakukan strategi marketing	0.160	2.501	0.4000
5	efektivitas produksi yang tidak menentu	0.120	2.401	0.2880
Kekuatan				
1	Kearifan lokal produk yang memiliki nilai tambah	0.180	3.001	0.5400
2	Terorganisir komunitas pelaku UMKM	0.120	2.150	0.2670

3	Permintaan produk lokal di sektor UMKM masih tersedia	0.120	1.250	0.1500
Total		1.000		2.350

Sumber: Analisis Data Primer, 2023

Berdasarkan perhitungan tabel diatas maka diperoleh hasil IFE bahwa nilai total yaitu 2,350 terhadap kegiatan sektor UMKM di Kota Pangkalpinang. Skor terbesar terlihat pada faktor produk yang masih mempunyai “*value* kearifan lokal” sebagai kekuatan, bahwa masih memiliki peluang untuk dikembangkan secara lebih matang sehingga mampu mendapat predikat sebagai produk atau *brand* identitas. Kekuatan tersebut harus didukung dengan regulasi dan perlindungan hukum terhadap produk unggulan yang memiliki nilai kearifan lokal. Hasil matrik IFE menjelaskan bahwa secara umum menunjukkan pengelolaan bisnis UMKM, belum mampu memanfaatkan kekuatan secara optimal dalam menjawab persoalan yang ada sehingga terlihat dalam lima kelemahan utama. Menurut (Silfia & Utami, 2021), apabila rata-rata skor total dari setiap matriks IFE dengan skor 2,50 menunjukkan bahwa posisi internal masih lemah namun apabila skor diatas dari 2,50 menjelaskan bahwa posisi internal masih kuat. Secara umum dalam hal ini kondisi internal matriks IFE ini masih lemah. Inovasi produksi di masa depan diharapkan dapat memberikan nilai yang berbeda pada akselerasi semakin banyaknya produk unggulan, sehingga meningkatkan permintaan produk dari kosumen. Disisi lain apabila kebijakan yang disusun oleh pemerintah Kota Pangkalpinang juga menjadi pondasi dasar, dalam rangka mendorong adanya restrukturisasi pola bisnis proses yang baru sehingga dapat mendorong transformasi basis ekonomi lokal yang awalnya konvensional kemudian akan menjadi industri dengan menggunakan inovasi digital yang terintegrasi. Namun minimnya improvisasi dalam bidang pengelolaan produk dan distribusi akan membuat para pelaku UMKM sulit bertahan dengan kondisi internal yang cukup sulit untuk diselesaikan (Nur Aziz Zakiah, 2022). Maka dari itu kelemahan-kelemahan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan kekuatan yang ada ditambahkan afirmasi kebijakan pemerintah lokal yang berpengaruh.

Table 2. Hasil Analisis Matriks EFE Sektor UMKM di Kota Pangkalpinang

No	Faktor Eksternal	Besaran	Rating	Skor
Opportunity				
1	Strategi dan kebijakan relaksasi modal dan inovasi pemerintah pusat dan daerah	0.1501	2.75	0.413
2	Sinergi antara pemangku kepentingan di sektor UMKM	0.1530	3.10	0.474
3	Penyediaan pasar dan ruang ekosistem bisnis	0.1151	3.30	0.380
4	Penyediaan ruang komersialisasi sebagai penunjang bisnis seperti outlite UMKM, kerjasama dengan pelaku pariwisata dan lain-lain	0.0970	1.75	0.170
5	Dekat dengan pusat kota dan kegiatan ekonomi lokal mempermudah distribusi dan pengenalan produk	0.0530	1.55	0.082
Challenge				
1	Persaingan antara produk skala lokal dan nasional	0.0871	3.75	0.326
2	Peningkatan kualitas sumber daya untuk inovasi dan pengembangan branding	0.0601	2.45	0.147
3	Membangun penguatan jaringan untuk pengembangan teknologi digital dan internet	0.1001	2.75	0.275
4	Standardisasi Mutu dan Branding	0.1101	2.75	0.303
5	Penelitian dan Pengembangan	0.0750	2.50	0.188
Total		1.000		2.756

Source: Analisis Data Primer, 2023

Peluang dan tantangan pengelolaan bisnis UMKM dapat teridentifikasi pada matriks faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut menjadi dasar dalam menyusun matriks *External Factor Evaluation* (EFE). Berdasarkan matriks EFE tersebut menegaskan bahwa total bobot skor untuk pengelolaan bisnis UMKM yaitu dengan skor 2,756, maka dapat dinyatakan skornya diatas 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produksi UMKM di Kota Pangkalpinang sebelumnya sudah mampu memanfaatkan peluang untuk mengatasi tantangan yang ada. Menurut (Lestari Nasution et al., 2021) kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi modal utama sebagai kunci berkembangnya sektor UMKM dalam menghadapi kompetisi dengan jenis industri lain di era digital. Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan khususnya saat pandemi bahwa tidak semua pelaku UMKM mampu bertahan serta mampu merespon peluang dan dapat menghindari ancaman atau dampak. Namun di beberapa daerah yang sudah baik dalam konteks kebijakan pengembangan UMKM, bahwa pelaku UMKM dengan SDM dan pengetahuan yang baik, terlatih, akan lebih mudah memberikan bantuan, sehingga dapat bertahan. Pengembangan bisnis UMKM yang berkelanjutan perlu di dorong dengan agenda utama untuk memberikan pengetahuan dalam menghadapi situasi-situasi *epidimologis* dan *emergency* sehingga dapat meminimalisir dampak yang negatif bagi usaha masyarakat (Nur Aziz Zakiah, 2022). Menurut (Hanim & Sopyono, 2021) kemampuan dari pelaku UMKM apabila sudah mampu menjawab tantangan secara internal dan eksternal, akan cenderung beradaptasi serta membangun inovasi baru, sehingga dapat bertahan bahkan bersaing di industri ditingkat yang lebih makro. Faktor internal dan eksternal yang menjadi prioritas dapat diminimalisir dengan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan untuk mencari solusi. Bentuk solusi tersebut dapat berupa transformasi pemanfaatan teknologi, dan strategi *branding*, serta membangun kerjasama secara masif. Kelemahan utama pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang yaitu sulitnya menemukan inovasi baru, menciptakan nilai tambah, dengan kreativitas untuk mengolah potensi sumber daya alam sehingga menghasilkan produk yang lebih kreatif termasuk menghadapi kondisi *epidimologis*.

Berdasarkan gabungan skor *Internal-External* (IE) yang diperoleh dari perhitungan IFE dan EFE, yang diperoleh nilai dari skor IFE yaitu sebesar 2,350 dan skor EFE yaitu sebesar 2,756. Keduanya dapat dikombinasikan menjadi pada matriks Internal-External. Temuan ini menegaskan bahwa penting untuk masa depan pelaku UMKM, mendorong kemampuan sumberdaya manusia dalam menciptakan peluang bisnis melalui penemuan inovasi produk baru, strategi marketing digital, penguatan *brand* yang menjadi daya tarik dari konsumen. Kelemahan tersebut tentunya harus menjadi karakter pelaku UMKM yang harus diberdayakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang sudah berkecimpung dibidang tersebut (Lestari Nasution et al., 2021). Didukung dengan temuan dari Sri Danang, (2021) bahwa untuk mendorong pertumbuhan di sektor UMKM, maka pelaku bisnis UMKM dapat melaksanakan strategi penetrasi terhadap pasar, inovasi produk, atau *strategi integrasi* seperti integrasi yang bersifat depan, integrasi yang bersifat ke belakang dan integrasi yang bersifat horizontal. Integrasi yang bersifat ke depan artinya mendapatkan lebih banyak kendali dari pihak distributor atau dari pihak perwakilan. Integrasi yang bersifat ke belakang dalam hal ini wajib mencari atas kepemilikan atau atas dasar kendali dari pemasok yang nilainya lebih besar. Sementara Integrasi yang bersifat horizontal harus mencari kepemilikan atau kontrol yang

lebih besar atas pesaing yang ada dengan produk yang sama. Strategi tersebut tentunya memerlukan upaya yang lebih besar bagi pelaku bisnis UMKM secara mandiri, akan tetapi tetap atas dasar dan dukungan dari regulasi yang diterapkan oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Saat ini kebijakan tersebut belum tersedia di Kota Pangkalpinang sehingga memberikan pengaruh terhadap penetrasi pertumbuhan ekosistem bisnis UMKM yang ada, saat ini masih lambat. Menurut hasil analisis IE, temuan penting dalam riset ini yaitu beberapa afirmasi kebijakan yang harus dilaksanakan adalah dengan menentukan prioritas dan strategi utama yang sesuai dengan konsep yang terdapat dalam strategi *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) guna mendorong akselerasi bisnis UMKM di Kota Pangkalpinang keluar dari keterpurukan selama masa pandemi. Secara lebih jelas terkait dengan kebijakan tersebut dapat dilihat dari matriks berikut.

Table 3. Analisis QSPM untuk Kebijakan Relaksasi Perkembangan UMKM di Kota Pangkalpinang

No	Skor Alternatif Strategi	Total <i>Attractiveness</i>	Peringkat
1	Pengembangan varian produk ekonomi kreatif	5.510	3
2	Peningkatan pemasaran dan promosi digital	5.820	1
3	Memperkuat kemitraan bisnis	5.360	4
4	Memberikan akses permodalan dan relaksasi kredit	5.561	2

Sources: Secondary Data Analysis, 2021

Menurut hasil perhitungan matrik tersebut, penguatan inovasi, marketing dan branding menggunakan konsep digital menjadi strategi utama karena masuk ke dalam urutan pertama yang dapat diinisiasi oleh pelaku bisnis UMKM di Kota Pangkalpinang. Strategi utama tersebut harus diperkuat melalui berbagai bantuan pemerintah dalam hal pendidikan, *coaching clinic*, pembinaan berkelanjutan, dan praktik langsung untuk menghadapi perubahan pasar yang relatif sangat cepat, seperti peristiwa yang tidak terduga yaitu pandemi (Hanim & Soponyono, 2021). Standardisasi produk UMKM juga harus memperhatikan aspek efisiensi pada seluruh tahap baik dalam input, *processing*, *output* sampai ke tahap *outcome* kegiatan produksi. Strategi lainnya terkait dengan pengembangan bisnis UMKM untuk kebijakan relaksasi tersebut adalah komitmen stakeholder lainnya seperti perusahaan dengan venue lebih besar, pemerintah pusat, R&D bahkan lembaga penyediaan biaya keuangan untuk menjalin kerjasama. Keterlibatan pihak lembaga keuangan dari BUMN juga berperan dalam mendorong keberhasilan strategi tersebut khususnya dalam membuka akses penyediaan bantuan finansial sampai dengan dukungan teknis. Bentuk akses finansial bisa dilakukan dengan memberikan kredit bunga murah untuk pembiayaan pengembangan bisnis UMKM yang mudah dijangkau bisa melalui skema APBN, skema *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu juga bisa membuka kompetisi dana hibah untuk kemudahan akses modal bagi pelaku bisnis UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi usaha besar. Strategi dukungan teknis dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelatihan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Relaksasi dan afirmasi kebijakan tingkat lanjut pemerintah Kota Pangkalpinang di masa mendatang harus mampu menyediakan kebetuhan yang relevan dengan masalah UMKM bisa juga mengadopsi dalam strategi QSPM. Selain itu perlunya penyediaan ruang komunitas bagi pelaku UMKM sebagai upaya untuk membangun

jejaring dan *sharing knowledge*, keterampilan, pengembangan inovasi teknologi, preferensi lokasi pasar, dan informasi lainnya. Disisi lainnya pembelajaran mengenai standarisasi kompetensi pelaku usaha perlu dilaksanakandengan baik melalui peningkatan kreativitas sumber daya manusia dan penyediaan teknologi yang relevan untuk memperoleh produk yang mampu bersaing di pasar yang dan kompetitif (Nur Aziz Zakiah, 2022).

KESIMPULAN

Selama berlangsungnya masa pandemi maka ketahanan pelaku usaha UMKM di Kota Pangkalpinang tidak sepenuhnya bisa bertahan menghadapi berbagai tantangan serta hambatan produksi serta distribusi. Akibatnya banyak pelaku yang berhenti berproduksi karena keterbatasan modal, permintaan konsumen rendah. Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menyediakan akses modal dan pasar untuk menjaga kestabilan produksi barang dari pelaku usaha UMKM. Pemerintah Kota Pangkalpinang belum mampu memberikan tanggapan dan strategi tepat terhadap masalah yang dialami oleh pelaku UMKM akibat pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan omset dan sulitnya mendapat bahan baku. Berdasarkan hasil analisis QSPM bahwa kebijakan utama yang harus dilakukan pemerintah Kota Pangkalpinang adalah penguatan inovasi, *marketing dan branding* menggunakan konsep digital dalam relaksasi usaha UMKM di Kota Pangkalpinang. Langkah kongkretnya adalah dengan membangun kerjasama, penguatan standardisasi dan nilai produk serta selalu menerapkan strategi efisiensi pada berbagai tahapan kegiatan produksi. Kebijakan relaksasi bisnis UMKM ini juga dimaksimalkan melalui komitmen pemangku kepentingan lainnya, melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat-daerah, perusahaan besar, R&D bahkan melibatkan penyedia dana. Komitmen dengan pemerintah dan penyedia dana bisa mencakup keterlibatan bantuan finansial sampai dengan dukungan teknis. Bentuk akses finansial bisa dilakukan dengan memberikan kredit bunga murah untuk pembiayaan pengembangan bisnis UMKM yang mudah dijangkau. Langkah dukungan teknis dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan yang berkelanjutan dan terintegrasi sebagai upaya untuk menemukan inovasi terbaik

DAFTAR RUJUKAN

- Abdi, M. C., Soemitra, A., & Daulay, A. N. (2022). *Analisis Dampak Pandemi Covid 19 pada UMKM dan Upaya Pemerintah dalam Menyelamatkan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19 di Kota Medan* (Vol. 2, Issue 2). <https://www.online-pajak.com/tentang-pph->
- Agustriyana Darwis Dkk. (2021). *Bertahan Usaha Pada UMKM di Tengah Pandemic Covid-19*. 3(2), 94–101.
- Ahyar Syafwan Lysander, M., Prawita, D., Maulana Yusup, A., Ekonomi, F., & Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, U. (2022). Jurnal Mirai Management Upaya Pengembangan UMKM Pasca Pandemi Covid-19 di Kab. Sumedang. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 54–65. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2499>
- Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., Alhada, M., Habib, F., Jurusan, M., Bisnis, M., Uin, S., Tulungagung, A. R., Fakultas, D., Dan, E., &

- Sayyid, U. (2021). Analisis Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis*, 83(1), 2808–7089. <https://doi.org/10.21274>
- Frihatni, A. A., Sudirman, I., Mandacan, F., Keuangan, B., Daerah, A., & Selatan, M. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Umkm Dan Strategi Bisnisnya: Studi Kasus Umkm Irrenuang Parepare Di Indonesia*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Hanim, L., & Soponyono, E. (2021). *Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19*.
- Lestari Nasution, W. S., Nusa, P., & Putra, S. D. (2021). Membangkitkan Umkm Di Tengah Pandemi Covid 19. *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.52362/tridharmadimas.v1i1.494>
- Maryama, S. (2013). Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Liquidity*, 2(1), 73-39.
- Nur Aziz Zakiah. (2022). *Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masapandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah* (Vol. 15).
- Raharja, S. J., & Natari, S. U. (2021). Pengembangan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Penggunaan Dan Pengelolaan Media Digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.32361>
- Setiawan, B. (2018). Edukasi E-Commerce Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 2(2), 106-110.
- Silfia, B., & Utami, A. (2021). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia* (Vol. 03, Issue 1).
- Sri Danang, W. R. (2021). *Mengungkit Daya Saing Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Guna Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional*.
- Vidyatmoko Dyan. (2020). Development Of Food Msme Entrepreneurs Policy During And Post Covid-19 Pandemy. In *Jurnal Analis Kebijakan* / (Vol. 4, Issue 2).
- Yunitasari, Herma & Ahyar Yuniawan. 2006. Analisis Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas dan Loyalitas Merek terhadap Nilai Pelanggan Mobil Merek Toyota. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 3(2): 15.
- Yunus Riza M. (2022). *Tantangan Umkm Dalam Memasuki Pemasaran Digital Di Masa Pandemi Covid-19*. 6(3), 1689–1699.